

PERAN DP3AP2KB DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN

Thadeus Frits Fautngiljanan
NPP. 30. 1505

Asdaf Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: thadeusfritsfaungiljanan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Suaib Ibrahim, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Empowerment of quality family village communities is generally carried out by Regional Apparatus Organizations that have scope in the areas of population control, family planning, women's empowerment and child protection. The change in the self-sufficient village community from a disadvantaged village to a non-lagging village, one of which is an independent village, is one of the elements of rural development planning, namely the quality family village program. Therefore, efforts to empower quality family village communities are an aspect of the strategy that is still being faced by DP3AP2KB Merauke Regency. **Purpose:** research is to find out how the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning, Population Control and Family Planning in Merauke Regency, South Papua Province. **The Method** of this research is descriptive qualitative, with **Results/Findings:** It was found that there was a national policy which became a benchmark for the KB village in empowering the KB village where the village had improved the quality of services with adequate health facilities so that it could be in **conclusion:** that in this study it was concluded that the role as a policy, there is a national policy that is used in empowering KB villages, namely improving the quality of services in health facilities. The role as a strategy is to approach services through health facilities that are easily accessible by the community. However, there was rejection of the KB village program due to a lack of understanding in conveying the message, in family planning, fees were given to participants who experienced failure from pregnancy to birth. Limited budget used for socialization. The external factor that is a problem is that the participation of the community in participating in the KB village program is still low. Even so, the government continues to strive to overcome these obstacles by directly participating in the field
Keywords: Empowerment, Role of Family Planning Village, Strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas pada umumnya dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai ruang lingkup pada bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan masyarakat desa semesta dari suatu desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal salah satunya yaitu desa mandiri merupakan salah satu unsur dari perencanaan pembangunan perdesaan yaitu program kampung keluarga berkualitas. Maka dari itu, Upaya pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas menjadi aspek strategi yang masih dihadapi DP3AP2KB Kabupaten Merauke. **Tujuan :** penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Adapun **Metode** penelitian ini adalah dengan kualitatif deskriptif, dengan **Hasil/Temuan :** Di temukan terdapat Kebijakan nasional yang menjadi suatu tolak ukur kampung KB dalam pemberdayaan kampung KB dimana kampung tersebut telah meningkatkan mutu pelayanan dengan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga dapat di **simpulkan :** bahwasannya Pada penelitian ini disimpulkan bahwa peran sebagai suatu kebijakan, terdapat kebijakan Nasional yang digunakan dalam pemberdayaan kampung KB yaitu peningkatan mutu pelayanan yang ada di fasilitas Kesehatan. Peran sebagai suatu strategi melakukan pendekatan pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau Oleh masyarakat. Akan tetapi terjadi penolakan terhadap program kampung KB yang disebabkan karena kurangnya pemahaman penyampaian pesan, dalam ber-KB diberikan biaya kepada peserta yang mengalami kegagalan dari saat kehamilan sampai dengan kelahiran. Keterbatasan anggaran yang digunakan untuk sosialisasi. Faktor eksternal yang menjadi masalah adalah kesertaan masyarakat dalam mengikuti program kampung KB masih rendah. Meskipun begitu, pemerintah terus berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan turun langsung kelapangan

Kata kunci : Pemberdayaan,Peran Kampung KB,Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Kampung, Desa adalah sebuah entitas hukum yang terdiri dari masyarakat yang memiliki batas wilayah dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Desa dianggap sebagai garda terdepan dalam segala urusan dan berperan sebagai harapan utama untuk mencapai keberhasilan segenap unsur di atasnya. Program "Kampung Keluarga Berkualitas" merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi agenda Nawacita periode 2015-2019. Program ini merupakan implementasi dari tiga agenda prioritas sekaligus, yaitu agenda ke-3 (Pembangunan Infrastruktur), agenda ke-5 (Revolusi Mental), dan agenda ke-8 (Pembangunan Wilayah Tertinggal). Namun, jika suatu desa yang menerapkan program Kampung Keluarga Berkualitas mengalami kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas, hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kemajuan desa tersebut. Kelangkaan sumber daya manusia berkualitas dalam suatu desa yang menerapkan program Kampung Keluarga Berkualitas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya angka pengangguran, tingginya angka kriminalitas, kemiskinan, inflasi, kesejahteraan sosial yang tidak merata, serta terhambatnya kegiatan organisasi dan sistem informasi organisasi sehingga tujuan program tidak tercapai. Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menekankan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus tidak hanya memfokuskan diri pada masalah pengendalian penduduk, tetapi juga pada masalah pembangunan keluarga. Oleh karena itu, program Kampung Keluarga Berkualitas dirancang untuk membantu memperbaiki kondisi keluarga di desa melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga. Beberapa indikator untuk mencapai kampung keluarga berkualitas selain pemberdayaan masyarakat yang memenuhi juga terdapat komitmen kuat, integrasi lintas sektor, optimalisasi fasilitas, dukungan mitra kerja, semangat dedikasi pengelola kampung KB, dan petugas lini lapangan KB, Kampung keluarga kurang berkualitas yang sangat tinggi harus diberdayakan supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Kabupaten Merauke merupakan daerah dengan pembangunan kampung keluarga berkualitas yang cukup baik beberapa tahun terakhir 2016, akan tetapi pada tahun 2018 kenaikan jumlah kampung keluarga berkualitas yang di alami lebih sedikit dari tahun-tahun sebelum. Penurun jumlah kampung KB Kabupaten Merauke selama 3 tahun terakhir. Upaya Pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas menjadi aspek strategi yang masih dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 Kabupaten Merauke menyatakan 9 (sembilan) permasalahan yang masih yang masih dialami. Dari keseluruhan masalah di antaranya adalah permasalahan mengenai keluarga berkualitas yaitu belum optimalnya cakupan masyarakat usia subur dalam partisipasi

program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, masih kurang angka kampung keluarga berkualitas, terbatasnya sarana prasarana penunjang dan rendahnya kuantitas tenaga lapangan keluarga berencana.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 Kabupaten Merauke menyatakan 9 (sembilan) permasalahan yang masih yang masih dialami. Dari keseluruhan masalah di antaranya adalah permasalahan mengenai keluarga berkualitas yaitu belum optimalnya cakupan masyarakat usia subur dalam partisipasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, masih kurang angka kampung keluarga berkualitas, terbatasnya sarana prasarana penunjang dan rendahnya kuantitas tenaga lapangan keluarga berencana sehingga ini menjadi kesenjangan masalah yang di ambil oleh Peneliti di dalam Penelitian ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam pemberdayaan yang pertama adalah peneliti mengambil penelitian sebelumnya yang di teliti oleh Yupita (2020) dengan judul “Peran (DP3AKKB) Provinsi Banten Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Industri Rumahan Di Kecamatan Kaesemen Kota Serang Banten dimana Peneneltian tersebut menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif di mana hasil penelitian tersebut terkait mekanisme yang di lakukan oleh BP3AKKB provinsi banten melalui program IR memiliki beberapa tahap.Selanjutnya adalah penelitian kedua yang di teliti oleh Rusnawati (2022) dengan judul “Evaluasi Program KKBPK melalui implementasi kampung kb sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di kabupaten hill sungai selatan “selanjutnya ialah penelitian ke tiga yang di teliti oleh Mohammad aditty andik (2022) dengan judul Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluargan Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana yang membedakan penelitian peneliti adalah tempat waktu dan juga hasil dan pembahasan yang membedakan penelitian peneliti dan pemelitian sebelumnya

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan **metode** penelitian ini adalah dengan kualitatif deskriptif, Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Sekretaris DP3AP2KB, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Kepala Seksi

Pelaksana Pembangunan Keluarga, Kepala Seksi Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Seksi Pembinaan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berencana Di Kabupaten Merauke. Peran Sebagai Suatu Kebijakan Tujuan dalam pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas merupakan Langkah pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang bisa diseimbangkan dengan perencanaan pembangunan agar tidak terjadi krisis ekonomi, konflik atau kesenjangan tingkat sosial dalam masyarakat. Salah satu wujud dalam upaya dalam pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas adalah dengan menggunakan program Keluarga Berencana. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah memberikan 2 indikator yang dikembangkan yaitu keterlibatan stakeholder dan unsur pelaksana dalam perumusan dan Relevansi pembentukan suatu terhadap urgensi yang dihadapi suatu organisasi yang digunakan dalam menganalisis peran sebagai suatu :

1. Keterlibatan Stakeholder Dan Unsur Pelaksana Dalam Perumusan Kamiakin,

System pembuatan tidak dilakukan individu seorang pemimpin untuk menjadi pengambil keputusan yang baik atau *decision maker*, namun hal pengambil keputusan dapat mengikutsertakan sampai lingkungan masyarakat kampung untuk melibatkan beberapa pihak yang diikutsertakan dalam perumusan. Pihak-pihak yang terkait dalam perumusan Kebijakan suatu instansi kemudian dikenal dengan istilah stakeholder. Dimensi peran dengan memanfaatkan indikator keterlibatan stakeholder untuk mengukur proses perumusan Kebijakan yang sesuai. Hal ini dapat mepertegas keyakinan masyarakat bahwa pembuatan Kebijakan tidak hanya dirancang dan diformulasikan oleh pemerintah saja, namun tetap menyertakan pertimbangan dari perwakilan masyarakat dan stakeholder terkait. Dalam membangun analisis berdasarkan indikator adalah memantau keikutsertaan komponen yang terlibat dalam perumusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Merauke. Dari observasi yang dilakukan selama melaksanakan penelitian, keterlibatan pembuatan Kebijakan juga melibatkan unsur masyarakat. Dilihat dari gambar keterlibatan PLKB dan stakeholder dari dinas yang selalu rutin kegiatan melaksanakan rapat koordinasi yang dilakukan Bersama PPKBD dan Sub PPKBD yang dilakukan di desa.

2. Relevansi Pembentukan Suatu Kebijakan Terhadap Urgensi Yang Dihadapi Suatu Organisasi Unsur yang menentukan kualitas

dalam peran suatu instansi adalah tingkat keterlibatan kebijakan terhadap keadaan lingkungan sekitar, masyarakat membutuhkan suatu peraturan atau regulasi yang tentunya bisa memudahkan masyarakat dengan situasi yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menaati peraturan serta mewujudkan terselenggaranya suatu kebijakan. Peran Sebagai Strategi Peran bisa diwujudkan melalui realisasi dengan melibatkan keberadaan strategi yang baik. Untuk mengidentifikasi peran dari strategi yang bentuk oleh organisasi, penulis membagi kepada 2 indikator yaitu terlaksananya visi melalui misi, tujuan dan strategi, dan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang pelayanan sebagai bentuk pengembangan dari penulis menjelaskan hal khusus proses analisis di misi yang telah ditentukan. Peran Sebagai Alat Komunikasi Minat masyarakat terhadap sebuah pelayanan merupakan kunci utama

ketertiban pelaksanaan pelayanan. Pelayanan yang dilaksanakan Oleh pemerintah dalam meningkatkan minat pada masyarakat diawali dengan berbagai reaksi, salah satunya penolakan. Saat memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan juga Advokasi pada masyarakat perlakuan yang kerap dijumpai akibat persepsi yang belum bisa diterima dan ketidaktahuan masyarakat terhadap layanan yang sedang dilaksanakan. Komunikasi berperan sebagai upaya yang berkesinambungan untuk membangun persetujuan masyarakat terhadap pemberlakuan layanan, khususnya pelayanan KB dimana menjadi salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat kampung melalui kehamilan Yang direncanakan. Komunikasi Yang baik juga dapat menghilangkan penolakan dari masyarakat terhadap kemungkinan terburuk Ketika mengikuti program kampung KB karena mampu menumbuhkan kepercayaan dan hubungan baik antara pengelola program Keluarga Berencana dan Pasangan Usia Subur yang menerima layanan. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa Konflik hadir untuk menentukan suatu organisasi mampu menghadapinya dan menjadi evaluasi dalam berkegiatan di organisasi atau menghindari dari masalah yang ada sehingga tidak ada kemajuan yang didapat. Berkaitan dengan ini, penulis juga meninjau aspek penyelesaian sengketa atau konflik yang muncul saat diadakanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Advokasi dan penyuluhan program kampung KB sebagai bentuk dari upaya Pemberdayaan masyarakat kampung KB. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke memberikan bagi unit pelaksana untuk dapat tanggap dan proaktif menuntaskan permasalahan teknis terkait penyelenggaraan di lapangan.

3. Peran Dinas Sebagai Terapi

Pengertian terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang Yang sedang sakit, pengobatan penyakit dan perawatan penyakit. Dalam bidang medis kata terapi mempunyai persamaan makna dengan kata Pengobatan. Terapi dapat disimpulkan usaha pengobatan yang dilakukan ahli terhadap klien dengan cara medis maupun non medis. Dengan terapi seorang klien dapat berusaha untuk menyembuhkan penyakit ataupun gangguan Yang dialaminya seperti dalam hal kecemasan, stress atau yang lain. Kualitas Output Terapi merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kondisi menjadi pulih seperti sedia kala. Terapi lebih kepada berupaya mengembalikan dan memberikan tindak lanjut terhadap pihak yang telah mendapat dampak negatif dari permasalahan. Oleh karenanya terapi dapat dikatakan sebagai proses rehabilitasi terhadap perlakuan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan pada suatu pelayanan yang didapat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pasal 23 ayat (1) huruf f dan g disampaikan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan.

Landasan hukum diatas menjadi dasar pelaksanaan penyembuhan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke terhadap peserta KB aktif yang telah mendapati dampak dari kegagahan ber-KB dalam mencegah kehamilan

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian Yang menjadi temuan penelitian adalah Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Hambatan merupakan suatu halangan Hal ini menjadi atau rintangan aspek yang yang dihindari muncul saat melaksanakan suatu kegiatan.oleh suatu organisasi supaya setiap rangkaian pelayanan dapat dijalankan dengan lancar dan tertib. Analisis hambatan atau kendala ditemukan penulis dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hambatan ditemukan penulis pada dimensi peran sebagai suatu strategi dan peran sebagai alat komunikasi. Berikut merupakan hambatan yang diidentifikasi oleh penulis saat melakukan penelitian. Jumlah Pegawai Lapangan Kelengkapan unsur penyelenggara menjadikan pelayanan dapat beroperasi dengan lancar. Kecukupan jumlah pegawai dengan ruang lingkup wilayah kerja menjadi indikator terpenuhinya standar pelayanan yang optimal. Apabila suatu layanan terlaksana dengan durasi waktu yang lama maka kekurangan personil dapat menjadi salah satu penyebabnya. Berhubungan dengan hal tersebut penulis meletakkan titik fokus pada kecakupan personil penulis berdasarkan jumlah desa dan kelurahan yang terdapat dalam suatu kecamatan. Penulis melakukan observasi dan wawancara kepada koordinator lapangan PLKB kecamatan sota yaitu Ibu Norce Mahuze, koordinator lapangan Kecamatan Merauke Ibu Sri Hastutik dan koordinator lapangan PLKB Kecamatan Kumbene yaitu Ibu Maria Mokbun, AMK sebagai representasi pelaksanaan yang ada dilapangan. Ketiga informan Yang diwawancarai mengungkapkan pendapat yang sama jika kekurangan personil dalam berkomunikasi kepada masyarakat personil menjadi hambatan dalam memberikan pemahaman tentang Komunikasi, Informasi, Edukasi dan juga Advokasi yang dilakukan penyuluh melalui Generasi Remaja, PIK-Remaja, Sekolah Siaga Kependudukan dan juga program kampung Keluarga Berencana. Kekuatan personil merupakan aspek dasar pada suatu organisasi untuk menjalani tugas pokok dan fungsi dengan maksimal. Fungsi komunikasi kurang tercapai karena jumlah pegawai lapangan yang kurang. Akibatnya KIE, Advokasi dan penyuluhan KB tidak dapat merata dalam melakukan sosialisasi. Observasi ini dilakukan selama melakukan penelitian.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi pemuda dalam program lorong literasi di kelurahan Paccinongang ini yakni kesibukan para pemudanya, tingkat kesadaran yang masih rendah, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari dimensi Peran yang telah dibahas dalam penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan Sebagai berikut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke sudah berperan secara optimal dalam pemberdayaan kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Merauke. Dari dimensi peran yang digunakan dalam penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : Dimensi peran sebagai suatu kebijakan, terdapat kebijakan Nasional yang digunakan dalam pemberdayaan kampung KB yaitu kampung KB dan peningkatan mutu pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan Peran sebagai suatu strategi melakukan pendekatan pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau Oleh masyarakat. Terdapat 73 fasilitas kesehatan dari swasta dan pemerintah, 191 praktek bidan mandiri dan 38 praktek dokter yang bekerja sama dalam pelayanan KB, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Pelaksanaan podcat pada radio dilaksanakan oleh stakeholder dalam Peran sebagai radio alat komunikasi, secara oleh langsung maupun tidak langsung juga dilaksanakan melalui PIK-R, Generasi Rernaja, Sekolah saga Kependudukan, Whatsapp massanger. Masih terjadi penolakan terhadap program KB yang disebabkan karena kurangnya pemahaman penyampaian pesan, dalam ber-KB diberikan biaya kepada peserta yang mengalami kegagalan dari saat kehamilan sampai dengan kelahiran Tetap konsisten sebagai problem solver terhadap keluhan masyarakat ber-KB maupun kegagalan ber-KB. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat melaksanakan Pemberdayaan Kampung KB sebagai berikut: Keterbatasan tenaga lapangan/PLKB yang merupakan pegawai yang rnepunyai kompetensi terhadap pelaksanaan program KB, advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi. Keterbatasan anggaran yang digunakan untuk sosialisasi Faktor eksternal yang menjadi masalah adalah kesertaan masyarakat dalam mengikuti program KB masih rendah Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menghadapi beberapa hal yang dirasa menjadi hambatan lain sebagai berikut: Menambah personil tenaga lapangan dari desa yaitu PPKBD dan Sub PPKBD yang diharapkan mampu membantu dalam kegiatan penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat masing masing desa. Memanfaatkan kegiatan masyarakat dengan Ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti PKK, kerjasama dengan sekolah untuk menjalankan program sekolah siaga kependudukan untuk memberikan penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung KB di Kabupaten Merauke untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Kepala Dinas DP3AP2KB beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Mohammad Adhitya Andhika (2022). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB Provinsi Sumatera Selatan

Rusnawati (2022) dengan judul “Evaluasi Program KKBPK melalui implementasi kampung kb sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di kabupaten hill sungai selatan

Yupita (2020) dengan judul “Peran (DP3AKKB) Provinsi Banten Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Industri Rumahan Di Kecamatan Kaesemen Kota Serang Banten

Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Kampung

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pasal 23 ayat (1) huruf

